

Peranan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat pada Massa Pandemi Covid-19 di Desa Pangli

Abdul Latif¹, Andi Mardiana², Misrawati Kusmin³, Yolanda Abdullah⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email: ¹abdullatif1003@gmail.com, ²andimardianabone@gmail.com,

³misrawatikusmin@gmail.com, ⁴abdullahyolanda@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peran pemerintah Desa Pangli dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 dan mengetahui alur penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), serta mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Pangli Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 3 Dusun dengan Jumlah penduduknya 780 jiwa dan jumlah penerima bantuan sebanyak 84 kepala keluarga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Desa Pangli Telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan benar dan tepat sasaran, walaupun belum bisa memenuhi semua kebutuhannya, tetapi masyarakat desa pangli sangat terbantu dengan adanya BLT-Daba Desa, selain itu, mereka semakin menyadari tentang bahaya Covid-19..dan mengetahui cara pencegahannya.

Kata Kunci: Bantuan, Pemulihan Ekonomi, Pandemi Covid

Abstract

The purpose of this research is to provide insight and knowledge about the role of the Pangli Village government in helping communities affected by the Covid 19 pandemic and knowing the distribution channels of Village Fund Cash Direct Aid (BLT-Dana Desa), as well as knowing the impact felt by the beneficiary community. The target of this activity is the people of Pangli Village, Suwawa Timur District, Bone Bolango Regency, which consists of 3 hamlets with a population of 780 people and the number of aid recipients as many as 84 families. The results of this study found that the Pangli Village government had carried out the stages in distributing aid to the community correctly and on target, even though it had not been able to meet all their needs, but the people of Pangli Village were greatly helped by the existence of BLT-Daba Desa, besides that, they were increasingly aware about the dangers of Covid-19 and knowing how to prevent it.

Keywords: Aid, Economic Recovery, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Desa Pangli Kecamatan Suwawa Timur merupakan salah satu Desa yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya kondisi sosial ekonominya. Desa Pangli merupakan salah satu desa di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango seluas 210 ha dengan 3 dusun. Total populasi adalah 780 (laki-laki, 407; perempuan, 373). Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani karena sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian sedangkan sebagian lainnya berprofesi sebagai pengusaha, jasa dan lain-lain. Dampak penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Pangli adalah menurunnya kualitas dan kondisi

sosial ekonomi. Kualitas kondisi sosial ekonomi menurun seiring dengan menurunnya sumber pendapatan dan hasil panen. Adanya kebijakan pembatasan jam kerja dan pelarangan kegiatan relasional, termasuk hubungan ekonomi, menyebabkan kurangnya pendapatan dan hasil panen. Keadaan ini tentunya telah meningkatkan angka kemiskinan dan keterbelakangan. Memang pada titik tertentu kemiskinan dan keterbelakangan dapat memicu percepatan penyebaran virus ini (Trio, 2020). Asumsinya, kemiskinan dan keterbelakangan merupakan predisposisi penyebaran berbagai penyakit, termasuk penyakit menular (Kartono, 2014).

Pemerintah sedang memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, termasuk yang terkait pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Desa (BLTDana Desa).). Untuk mempercepat pelaksanaan BLT-Dana Desa, berbagai arahan lain telah dikeluarkan, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Menteri Keuangan. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pendekatan yang digunakan dalam konteks penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah partisipatif, yaitu pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

TINJAUAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi alamiah bagi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, yang telah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memadai. Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan seseorang, keluarga, masyarakat atau bahkan suatu negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, mengancam penegakan hak dan keadilan, mengancam posisi tawar (negosiasi) dalam hubungan dunia, hilangnya generasi dan kondisi suram, masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju, yang lebih menekankan pada “kualitas hidup”, yang dinyatakan dalam perubahan lingkungan, melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi atau bahkan meningkatkan polusi udara dan air, mempercepat penipisan sumber daya alam dan mengurangi pencemaran lingkungan. kualitas: Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 berdampak kecil terhadap pengurangan kemiskinan (Pratiwi, 2014). Menurut BPS (2010), penduduk miskin adalah orang yang rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan bulanan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis Kemiskinan Makanan adalah penjumlahan nilai konsumsi yang sebenarnya dari 52 bahan makanan pokok, yang kemudian disamakan dengan 2.100 kilokalori per kapita dan hari Garis Kemiskinan bukan makanan adalah jumlah kebutuhan minimum untuk barang-barang bukan makanan yang dipilih, yang meliputi barang-barang perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan di daerah perkotaan dan 47 jenis barang di daerah pedesaan.

Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (Arsyad, 2010).

1 Kemiskinan absolut adalah kemiskinan dalam arti perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan berdasarkan kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar minimum, yang merupakan ukuran kehidupan layak seseorang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang dan papan, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini bertujuan untuk menentukan pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik akan pangan, sandang dan papan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2 Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat dari segi kesenjangan sosial, suatu fenomena yang sering terjadi ketika seseorang, meskipun mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, masih jauh lebih rendah daripada masyarakat sekitarnya (lingkungan). Semakin besar kesenjangan antara tingkat pendapatan kelas atas dan bawah, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai miskin, sehingga kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia (2008) dari perspektif akses individu terhadap berbagai aset penting untuk menopang kehidupan, yaitu aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya lahan pertanian). atau tanah olahan), aset berwujud (misalnya modal, fasilitas dan infrastruktur manufaktur), aset keuangan (misalnya pinjaman bank dan

pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak politik). Kurangnya akses terhadap satu atau lebih aset di atas inilah yang menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan di negara berkembang merupakan hasil interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi relatif lambat.
2. Pendapatan per kapita negara berkembang juga masih rendah dan hanya tumbuh sangat lambat, bahkan dalam beberapa kasus stagnan.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat timpang. Yaitu
4. Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang buruk dan sangat terbatas, malnutrisi dan banyak wabah penyakit sehingga angka kematian bayi di negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi daripada di negara maju
6. Institusi pendidikan di sebagian besar negara berkembang dan isi kurikulum masih relatif tidak relevan atau tidak memadai. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan munculnya penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan rendah terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi serta lambatnya peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah semakin meningkat

Kepedulian Sosial

Bantuan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan sosial dan direncanakan secara profesional untuk menciptakan individu atau komunitas yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dan kemudian komunitas atau individu tersebut dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi membantu yang menekankan fungsi sosial manusia.

Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009): Pekerjaan sosial adalah: Kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, masyarakat untuk meningkatkan atau meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut yang bermanfaat. Profesi pekerjaan sosial, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah spesialisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan orang dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui interaksi, sehingga orang dapat menyesuaikan diri secara memuaskan dengan situasi kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajiban sosialnya. Permasalahan bansos yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang hak atas kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara memadai karena belum mendapatkan tunjangan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosial, sehingga menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep harkat dan martabat manusia, yang dapat dibaca dari empat indikator, yaitu:

- 1 Rasa aman (safety)
- 2 Kesejahteraan (welfare),
- 3 Kebebasan (liberty) dan
- 4 Identitas

Badan Pusat Statistik (BPS) (2000) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah, antara lain:

1. Jumlah pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga dan;
5. Kondisi perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dalam beberapa aspek kehidupan. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup material, mis. B. kualitas perumahan, makanan dan bagiannya;

1. Dengan melihat kualitas hidup dari perspektif fisik, seperti B. kesehatan fisik, lingkungan alam dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari perspektif mental, seperti B. lembaga pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari perspektif spiritual, seperti B. Moralitas, etika, kecocokan penyesuaian diri dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), konsep kesejahteraan dilihat dari tiga aspek;

1. Dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik (kondisi somatik), seperti gizi, kesehatan, harapan hidup, dll;
2. Dengan melihat tingkat mental (status mental/pendidikan) seperti pendidikan, pekerjaan, dll;
3. Dengan melihat integrasi dan status sosial (social status).

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan kelas menengah ke bawah dapat direpresentasikan dengan standar hidup masyarakat. Standar hidup masyarakat ditandai dengan pengentasan kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat. Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) BPS tahun 1989 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar pula proporsi pengeluaran keluarga untuk bahan makanan daripada non makanan. Artinya semakin kecil jumlah anggota keluarga maka semakin kecil pula porsi pendapatan untuk kebutuhan pangan, sehingga jumlah anggota keluarga berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

Pada dasarnya untuk memahami realitas tingkat kesejahteraan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain:

1. Rumah tangga atau komunitas sosial ekonomi
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi basis kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
3. Potensi daerah (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produktif, dan
4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan produksi dan pemasaran di tingkat lokal, regional dan global (Taslim, 2004).

Tujuan Kesejahteraan Sosial Menurut Fahrudin, dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, ia menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungan.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, terutama dengan masyarakat sekitar, misalnya dengan menyediakan sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, Schneiderman (1972) mengusulkan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai batas tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, kontrol sistem, dan perubahan sistem.

Fungsi kesejahteraan sosial, menurut Fahrudin dalam buku pengantarnya tentang kesejahteraan sosial, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi beban perubahan sosial ekonomi, menghindari konsekuensi sosial negatif dari pembangunan, dan menciptakan kondisi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. (Friedlinder & Apte, 1982).

Fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Preventif (Pencegahan) Bantuan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Healing) Perawatan sosial bertujuan untuk menghilangkan keadaan cacat fisik, emosional dan sosial sehingga orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara normal di masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan (rehabilitasi)

3. Fungsi Pembangunan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan atau pengembangan tatanan sosial dan sumber daya dalam masyarakat.
4. Fungsi Pendukung (supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan sektor atau bidang bantuan sosial lainnya.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada benda-benda alam. Objek alam adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau instrumen manusia, yaitu peneliti itu sendiri.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial ekonomi, yaitu: sebuah. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat fenomena dan fakta yang erat kaitannya dengan fenomena sosial, yaitu pandemi COVID-19. Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan ekonomi terhadap Peranan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Massa Pandemi Covid-19 di Desa Pangli

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini berkaitan dengan tugasnya sebagai peneliti utama dalam penelitian yaitu: untuk dapat mengetahui dampak pendapatan pedagang sayur dengan adanya pandemi Covid-19 di Peranan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Massa Pandemi Covid-19 di Desa Pangli. Sehingga data yang terkumpul lengkap, akurat dan memenuhi kebutuhan peneliti saat melakukan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah Desa Pangli Kecamatan Suwawa Timur

Waktu yang ditetapkan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dimulai dari persiapan penelitian sampai dengan pelaksanaan laporan penelitian, yang berlangsung dari bulan Mei sampai Juli 2020.

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada benda-benda alam. Objek alam adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau instrumen manusia, yaitu peneliti itu sendiri.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial ekonomi, yaitu: sebuah. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat fenomena dan fakta yang erat kaitannya dengan fenomena sosial, yaitu pandemi COVID-19. Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan ekonomi terhadap Peranan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Massa Pandemi Covid-19 di Desa Pangli

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini berkaitan dengan tugasnya sebagai peneliti utama dalam penelitian yaitu: untuk dapat mengetahui dampak pendapatan pedagang sayur dengan adanya pandemi Covid-19 di Peranan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Massa Pandemi Covid-19 di Desa Pangli. Sehingga data yang terkumpul lengkap, akurat dan memenuhi kebutuhan peneliti saat melakukan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah Desa Pangli Kecamatan Suwawa Timur

Waktu yang ditetapkan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dimulai dari persiapan penelitian sampai dengan pelaksanaan laporan penelitian, yang berlangsung dari bulan Mei sampai Juli 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin, baik yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak termasuk (exclusion error), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan dari pemegang PKH/BPNT/Kartu Prakerja;
- 2) Hilangnya mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup tiga bulan ke depan);
- 3) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis/kronis; Kartu Prakerja Dengan semakin terpenuhinya kriteria keluarga miskin dan rentan, menjadi penerima BLT Dana Desa akan lebih diprioritaskan. Tim pendata harus memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga miskin, lansia dan penyandang disabilitas terdaftar sebagai calon Keluarga Penerima Dana Desa (KPM).

3. Tahapan Memperoleh BLT Dana Desa

1) Fase Identifikasi

Kegiatan identifikasi tersebut bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai masyarakat Desa Pangsi yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Fokus kegiatan identifikasi ini adalah pendataan melalui pendataan nama lengkap dan alamat tempat tinggal (by name, by address). Data ini kemudian diverifikasi oleh tim pelayanan bersama dengan pemerintah kecamatan/desa dan pendeta untuk memberikan data yang valid dan akurat. Selama pendataan ini, tim bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kolaborasi dan koordinasi ini sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tentang masyarakat yang akan menerima bantuan Dana Desa Langsung Tunai.

Beberapa hasil yang diperoleh selama tahap identifikasi adalah sebagai berikut:

Sebagian besar orang telah mengalami dampak besar dari pandemi global Covid-19. Dampak terbesar dari kurangnya perbaikan ekonomi semakin berkurang. Banyak orang yang terkena dampak pengangguran. Begitu juga bagi petani yang tidak bisa menjual hasil panennya di pasar akibat penutupan akses (shutdown).

- a) Sebanyak 84 rumah tangga pada umumnya memiliki ciri-ciri kehidupan sebagai berikut: sebagian besar bekerja sehari-hari sebagai petani, hampir semua memiliki keluarga dengan rata-rata 5 anggota keluarga, sebagian janda dan duda tanggungan, sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). , sebagian besar tidak memiliki rumah layak huni, hampir semua peserta tergolong rumah tangga miskin berdasarkan informasi data dari aparat desa/kelurahan serta gereja dan masjid setempat.
- b) Dalam kondisi normal, standar situasi ekonomi Kota Desa Pangsi rata-rata sudah lemah dengan pendapatan kurang dari 11.000 per hari. Munculnya pandemi Covid-19 membuat situasi ekonomi semakin buruk. Untuk makan bulanan, mereka sangat mengharapkan bantuan dari pihak lain terutama dari

pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi atau pusat (Abdul, 2020; Dana, 2020). Jika tidak, mereka menderita kelaparan dan kesulitan melakukan aktivitas hidup sehari-hari.

c) Hampir semua masyarakat bingung dan khawatir dengan penyebaran virus yang beresiko di wilayah desa Pangli. Karena lemahnya kontrol terhadap akses mata pencaharian, mereka mungkin menjadi pembawa virus zona merah Covid-19 (Chakraborty & Maity, 2020).

d) Meski memiliki informasi tentang penyebaran virus Corona dan dampaknya bagi kehidupan, sebagian besar warga Desa Pangli belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara pencegahan penyebaran virus ini di rumah dan sekitarnya. Pada umumnya mereka tidak terbiasa menggunakan masker (masker wajah), mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman di keramaian. Nyatanya, banyak warga Desa Pangli yang masih berani menyelenggarakan acara keagamaan dan acara adat yang dihadiri banyak orang/orang banyak. Padahal, keramaian menjadi sangat potensial dan berisiko ketika menyebarkan virus secara berantai (Syarifudin, 2020). Mereka masih dipengaruhi oleh pemahaman agama yang dangkal dan fundamentalis bahwa pandemi ini bukan masalah kesehatan melainkan bentuk murka atau murka Tuhan terhadap manusia di dunia ini. Untuk menangkalkan wabah ini, disarankan agar semua umat berkumpul dan berdoa di rumah dan masjid mereka. Ada juga aktor tradisional yang berpikir secara tradisional. Kelompok-kelompok kepentingan tradisional melihat bahwa wabah ini adalah akibat dari putusannya hubungan antara manusia dan alam. Pandemi ini adalah bentuk kemarahan alam kepada orang-orang yang tidak merawat alam sebagaimana mestinya (Holsti &

2) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2021 (16-21 Januari 2021). Perencanaan ini lebih menitikberatkan pada penentuan jadwal kegiatan berdasarkan hasil review dan validasi data. Berdasarkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa, telah disepakati jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan ini selama minggu ke-4 Maret (24-27 Maret 2021). Berdasarkan kesepakatan, seluruh masyarakat di wilayah desa Pangli, yang kegiatannya akan dilakukan dalam satu hari (pagi 09.00-11.00 dan sore 14.00-17.00). Alasannya, komunitas-komunitas ini berada di wilayah yang bertetangga dan akses di antara keduanya mudah dilakukan dalam waktu singkat.

3) Sosialisasi

Sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim relawan dan pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami keberadaan Covid 19 dan penggunaan protokol kesehatan serta pemberian dukungan pemerintah berupa dana BLT Desa dapat mensosialisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. kriteria penerima. Pemerintah Desa Mengalokasikan anggaran penanggulangan dampak Covid-19 dalam bentuk bantuan tunai langsung dengan menggunakan Dana Desa Tahap I dan II. Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Dalam surat edaran tersebut, sudah menjadi kewajiban setiap desa untuk mengalokasikan anggaran bantuan tunai langsung dari dana desa untuk penanganan Covid-19. untuk seluruh masyarakat Desa Pangli sebanyak 84 KK dengan total anggaran Rp. 302.400.000. Sehubungan dengan merebaknya pandemi ini, anggaran Dana Desa telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masing-masing telah diubah dan diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 009/DPMD&DESA-BB/50 .a /III/2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa sasaran penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang berada di desa, dengan kriteria sebagai berikut::

- Bukan Penerima PKH
- Bukan Penerima BPNT
- Bukan Penerima Kartu Prasejahtera
- Bukan Penerima BST
- Bukan Penerima Perluasan Sembako
- Bukan Penerima JPS
- kehilangan Mata Pencaharian
- Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit.



Gambar 1. Sosialisasi pencegahan covid dan syarat penerima BLT oleh Pemerintah Desa Pangi dan Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur

4. Pendataan

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak selama Covid-19 masih berlangsung. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Desa PDTT telah mengubah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Desa Nomor PDTT 6 tahun 2020.

Perubahan peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, peraturan ini juga memuat aturan tentang kerja padat uang desa dan bantuan langsung dana desa (BLT-Dana Desa). Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan terlebih dahulu mendata masyarakat mana saja yang menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa.

Berikut beberapa mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dilaksanakan:

- a. sebuah. Mekanisme pendataan BLT pertama Dana Desa akan dilakukan oleh Dessan Lawan Relawan Covid-19. Setelah data terkumpul, pendataan difokuskan pada lingkup RT, RW, dan Desa.
- b. Kemudian hasil pendataan terhadap keluarga miskin sasaran dilakukan dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah secara acak. Satu agenda akan dibahas dalam konsultasi ini, yaitu validasi dan penutupan data
- c. Setelah dilakukan validasi dan kelengkapan, mekanisme pendataan BLT Dana Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
- d. Akhirnya, program BLT Dana Desa dapat segera dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja sejak diterima.



Gambar 2. Pendataan Penerima BLT Desa Pangi oleh Tim Relawan dan Pemerintah Desa Pangi

5. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Kepala desa memfasilitasi BPD dalam melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk membantu dalam penelaahan dan validasi data terkait penetapan penerima dana desa BLT.
- b) Berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima dana desa BLT. Berdasarkan daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa untuk bulan pertama.
- c) Kepala desa akan menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang telah disetujui kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman di setiap dusun dan/atau di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat menggunakan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik.

Ketika ada pengaduan masyarakat tentang daftar calon penerima BLT-Dana Desa, desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas pengaduan dan menyepakati solusi. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakili oleh Camat. Untuk bulan kedua penyalurannya, desa harus memastikan data penerima BLT Dana Desa sudah tervalidasi.



Gambar 3. Musyawarah Penetapan Penerimaan BLT Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pangi

6. Tahap Pengorganisasian

Setelah menyusun jadwal, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ditentukan dengan menentukan secara sistematis hari/tanggal/waktu kegiatan akan berlangsung. Kegiatan ini dilakukan dalam Musdes, Validasi, Finalisasi dan Determinasi. Validasi data ini membahas KPM yang layak mendapatkan BLT DD pada tahun

2021 sehingga dilakukan pemeringkatan dari awal sehingga KPM BLT benar-benar KPM buruk pada tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat 80 KPM BLT DD di Desa Pangi, terdiri dari keluarga miskin, masyarakat dengan penyakit kronis dan pemutusan hubungan kerja. Setelah pengesahan BLT DD tahun 2021, jumlah KPM BLT DD tahun 2021 menjadi 84 KK yang terdiri dari keluarga miskin riil. Kegiatan ini dilaksanakan dalam Musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data calon penerima BLT, yang di ikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PLD, KPMD, unsur tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

7. Peranan bantuan moneter langsung di masyarakat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat miskin, namun program tersebut telah membawa manfaat bagi mereka di tengah pandemi ini, namun kami berterima kasih kepada mereka saat ini karena telah mendapatkan BLT untuk membantu kami secara finansial. 10 orang lainnya yang diwawancarai di wilayah tempat tinggalnya mengatakan: “Selama penyaluran Bantuan Langsung Tunai, kami merasa terbantu. Uang itu kami pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur”, 5 orang lainnya ketika, setelah menggunakan Rp. 300.000 setiap bulan untuk semuanya, mereka berkata: “Uang itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.” 5 Berbeda dengan yang lain, ketika mereka bertemu di rumah, mereka menjelaskan bahwa "uang BLT akan digunakan sebagai tambahan modal penjualan, saya memiliki kios, jadi saya akan menggunakan uang BLT sebagai tambahan modal penjualan". Sementara itu, 3 umat paroki menanggapi untuk membayar biaya sekolah dan mengobati anak-anak mereka yang sakit.

Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama Bantuan Langsung Tunai masih merupakan kebutuhan pokok. Namun, bantuan tunai langsung memiliki manfaat yang luar biasa bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Jika pemerintah mau dan serius membangun dan memperkuat masyarakat pedesaan, maka pemerintah harus melaksanakan atau menggalakkan program-program pembangunan yang dipilih dan ditentukan secara bebas oleh masyarakat, dan ini tentunya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dimana pemerintah membuat program untuk membantu masyarakat miskin merubah pola pikir dari negatif menjadi positif dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terbukti dengan dukungan program, masyarakat Desa Pangi mulai mengubah pola pikirnya, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan.

Perubahan perilaku penerima Bantuan Langsung Tunai bidang pendidikan di Desa Pangi:

- Dulu orang tua tidak memotivasi anaknya untuk bersekolah, namun setelah adanya bantuan uang langsung di desa Pangi, orang tua mulai termotivasi untuk mendukung anaknya belajar walaupun hanya secara online.
- Orang tua yang dulunya tidak mampu membeli perlengkapan sekolah anaknya namun dengan dana BLT Covid 19 bisa membeli alat belajar online. Kesadaran orang tua terhadap pendidikan yang dulunya rendah, kini meningkat.
- Dulu sulit bagi orang tua untuk membayar sekolah dan buku pelajaran, tetapi sekarang mereka dapat membayarnya.
- Dulu orang miskin hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah.
- Masyarakat Desa Pangi yang dulunya tidak terlalu peduli dengan kesehatannya sendiri, kini lebih memperhatikan kesehatannya karena berdampak buruk pada tubuhnya di tengah pandemi ini.
- Ibu hamil yang belum pernah memeriksakan kehamilannya kini lebih cenderung memeriksakan kandungannya di Puskesmas setempat.

KESIMPULAN

Kegiatan amal yang dilakukan tim pengabdian tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Pangi yang terdampak Covid-19. Namun dengan adanya bakti sosial ini, masyarakat Desa Pangi merasa terbantu secara sosial ekonomi selama masa pandemi ini. Selain itu, mereka semakin sadar akan bahaya Covid-19 sehingga membangun kesadaran kritis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

mengurangi kemiskinan, serta masuk dalam rencana kerja pemerintah desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan keuangan kepada keluarga miskin desa yang bersumber dari Dana Desa untuk membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19. Nilai BLT Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan akan diberikan BLT selama 3 (tiga) bulan Dana Desa ini bebas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010 *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Boediono. 1998 *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Edi Suharto. 2009 *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta,
- Forbes, Dean K. 1989. *Geografi Keterbelakangan*, Sebuah Survey Kritis. Jakarta: LP3ES.
- Hartono, Tony. 2006 *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32A bagian 5 point b yaitu Besaran BLT Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Perubahan Peraturan Kepala Desa Pangi Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Daftar Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Dampak Covid-19 Desa Pangi